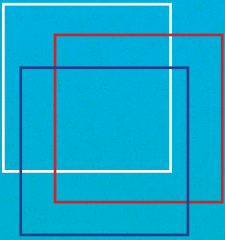


ASIA-PACIFIC
DECENT WORK
DECADE 2006
2015



International
Labour
Organization



Menanggulangi Permasalahan Pekerja Anak Melalui Pendidikan

Laporan Rapat Bersama Para Mitra yang
Diselenggarakan di ILO Jakarta

23 Januari 2013



DECENT WORK

A better world starts here

Menanggulangi Permasalahan Pekerja Anak Melalui Pendidikan

Laporan Rapat Bersama Para Mitra yang Diselenggarakan di ILO Jakarta

23 Januari 2013

Latar Belakang

Pada tahun 2011, ILO memulai sebuah proyek baru yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Negeri Belanda yang bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara pekerja anak dan peningkatan akses terhadap pendidikan. Tujuannya adalah mendorong terlaksananya diskusi agar terciptanya kebijakan-kebijakan dan program-program dalam bidang pendidikan, yang secara bertahap, dapat merengkuh anak-anak yang bekerja sebagai atau beresiko menjadi pekerja anak. Indonesia adalah satu dari empat negara di mana proyek ini diimplementasikan.

Pengakuan di dunia internasional bahwa keberadaan pekerja anak menjadi hambatan utama dalam meraih prestasi di bidang pendidikan untuk kesemua tujuan. Pada tahun 2012, Inisiatif Prioritas Pendidikan yang dicanangkan oleh Sekretaris Jendral PBB mengakui pekerja anak sebagai satu dari berbagai hambatan utama kepada sektor pendidikan yang harus diangkat.

Dokumen ini memberikan laporan berkenaan dengan rapat bersama para mitra yang diselenggarakan baru-baru ini untuk menilai kemajuan berbagai kegiatan proyek di Indonesia. Berbagai hasil kerja dari proyek-proyek di Indonesia telah meletakkan fokus pada sejumlah program aksi pada tingkat lokal yang mengangkat berbagai situasi yang dihadapi oleh para pekerja anak dengan memperluas akses kepada sektor pendidikan dan pelatihan. Program-program ini telah mendapatkan dukungan guna pelaksanaan penelitian dan berbagai aktivitas pendampingan lebih lanjut.

Pokok-Pokok Utama dan Berbagai Kesimpulan:

Pokok-pokok utama yang diangkat selama diselenggarakannya diskusi adalah:

1. Indonesia telah membuat kemajuan penting dalam menekan jumlah pekerja anak dan memperluas akses kepada bidang pendidikan. Program-program nasional seperti *Program Keluarga Harapan* dan *Bantuan Operasional Sekolah* telah mendukung upaya untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses sarana pendidikan.
2. Kebijakan nasional yang menyangkut Pekerja Anak mengakui kunci untuk menanggulangi pekerja anak adalah dengan membuka akses kepada pendidikan dasar.
3. Kendati kemajuan yang positif telah dicapai namun masih ada berbagai permasalahan yang menyangkut pekerja anak dan tingkat ketidakhadiran di sekolah yang cukup berarti. Hal ini acapkali bersifat spesifik di masing-masing Propinsi dan Kabupaten. Presentasi yang dilakukan oleh tiga mitra ILO yang masing-masingnya meletakkan fokus pada berbagai aspek pekerja anak yang berbeda yang mencerminkan berbagai situasi lokal di daerah mereka masing-masing.
4. Seringkali, permasalahan pekerja anak dan anak-anak yang putus sekolah yang belum terjangkau adalah permasalahan yang paling sulit untuk direngkuh. Permasalahan ini seringkali tidak dapat terjangkau oleh berbagai inisiatif program nasional. Sehingga, penting untuk diselenggarakannya diskusi-diskusi di tingkat lokal di antara Semua instansi yang berkepentingan, mitra-mitra sosial dan organisasi-organisasi masyarakat untuk mengenali berbagai tindakan tambahan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua anak dibawah usia minimum angkatan kerja dapat mengikuti pelajaran di sekolah secara teratur.
5. Berbagai inisiatif khusus untuk merengkuh anak-anak ini dapat dilaksanakan berdasarkan pada pengalaman yang telah didapatkan sebelumnya. Untuk itu anggaran untuk berbagai bentuk intervensi perlu dialokasikan.
6. Akan sangat membantu apabila upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong diskusi-diskusi di tingkat lokal dapat distimulasi melalui sektor pendidikan dan Peta Jalan dalam upaya penanggulangan

pekerja anak yang sedang dikembangkan oleh Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan bagi Anak. Guna mempromosikan dan mendorong diskusi semacam itu, maka laporan ini disebarluaskan pada kalangan luas pemangku kekuasaan.

Berbagai Presentasi tentang Proyek

Ketiga presentasi yang diberikan oleh mitra proyek ini:

- ♦ Sukabumi – Dinas Pendidikan Kabupaten
- ♦ Makassar – Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan
- ♦ Jakarta – Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

Berikut adalah uraian singkat dasar permasalahan anak yang diangkat oleh masing-masing program aksi, berbagai upaya yang sedang dilakukan, hasil yang telah dicapai sejauh ini, dan perspektif terhadap keberlanjutan intervensi setelah program aksi tersebut berakhir.

Permasalahan

Walaupun tingkat partisipasi bruto dalam dunia pendidikan pada tingkat SLTP di Kabupaten Sukabumi mencapai 92,57%¹, beberapa sub distrik memiliki tingkat partisipasi bruto yang jauh lebih rendah seperti Kecamatan Cimanggu (59,4%) dan Kecamatan Sukabumi (60,3%). Disamping berbagai permasalahan yang menyangkut penyediaan fasilitas pendidikan di dimana sebagian besar adalah daerah pedesaan, kesulitan lebih lanjut juga disebabkan oleh budaya lokal seperti memberikan penghargaan yang lebih tinggi pada anak-anak yang bekerja dibandingkan anak-anak yang bersekolah dan pernikahan dini, sehingga banyak anak-anak perempuan meninggalkan bangku sekolah lebih awal.

Banyak anak-anak di Sukabumi yang putus sekolah dan bekerja baik di daerah setempat atau bermigrasi ke Jakarta untuk bekerja.



Strategi

Satu metode yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam dunia pendidikan adalah pemanfaatan Sekolah Satu Atap. Sekolah-sekolah ini, pada umumnya berlokasi di daerah-daerah terpencil di mana fasilitas SMP terbatas, dengan menyediakan prasarana pendidikan baik bagi siswa-siswi tingkat SD maupun SMP. Pada tahun belakangan ini, terdapat peningkatan jumlah Sekolah Satu Atap ini sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah partisipasi siswa. Namun demikian sekolah-sekolah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan lokasi mereka yang terpencil, kesulitan dalam menyediakan guru-guru yang terlatih dan jumlah yang sesuai, serta kuatnya budaya lokal.

¹ Berdasarkan data untuk tahun 2010



Program aksi yang dimulai pada November 2011 ini, berupaya mencegah anak putus sekolah dan menjadi pekerja anak dengan memperkuat sekolah-sekolah satu atap di Sukabumi dan mengembangkan kelompok-kelompok pemantau di desa-desa setempat.

Strategi tersebut di antaranya

1. Berupaya membuat proses belajar bersifat inklusif melalui penguatan kapasitas para guru di Sekolah Satu Atap terpilih.
2. Meningkatkan persepsi relevansi pendidikan dengan mengenalkan pada para siswa-siswi dengan kegiatan pravekasional, yang diberikan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler.
3. Menyusun sistem pemantauan berbasis sekolah untuk anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang beresiko putus sekolah.

Hasil yang Telah Dicapai

Program aksi dimulai pada bulan November 2011. Hingga saat ini, program ini telah kolaborasi dengan 12 Sekolah Satu Atap di Kabupaten Sukabumi dan membekali 965 anak dengan berbagai program ketrampilan pravokasional. Program bersangkutan juga telah membekali 106 anak putus sekolah dengan program *bridging course* dan 30 diantaranya telah dirujuk kembali ke sekolah-sekolah pada tahun ajaran 2012.

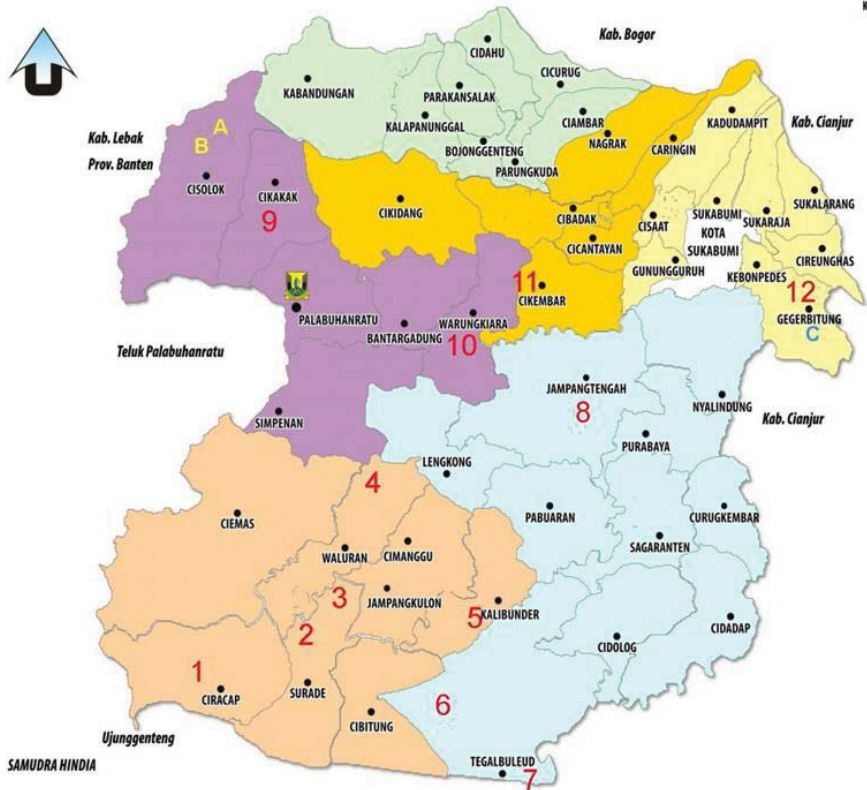
Kelompok-kelompok pemantau telah dibentuk di tiga desa yang sangat terpencil di Sukabumi. Kelompok-kelompok ini terdiri atas kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah-sekolah dasar setempat bersama-sama dengan para tokoh agama dan para tokoh desa. Peran dari kelompok-kelompok selama ini adalah untuk mengidentifikasi anak-anak di desa-desa tersebut yang putus sekolah, menjangkau mereka dengan mendekati para orang tuanya dan merujuk mereka untuk kembali bersekolah melalui program *bridging course*.

Keberlangsungan

Dinas pendidikan di Sukabumi telah memberikan perhatian khusus pada program pravokasional untuk siswa-siswi di Sekolah Satu Atap. Berdasarkan pengalaman yang didapat selama ini, ada keinginan dari Dinas Pendidikan untuk melanjutkan program ini yang dialokasikan dari anggaran yang mereka miliki dan diskusi lebih lanjut mengenai hal ini telah berlangsung.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terus menerus memperluas akses pada sarana pendidikan dasar dengan membangun Sekolah-Sekolah Satu Atap di daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerima dukungan dari AusAID untuk membangun paling tidak 200 Sekolah Satu Atap di daerah-daerah terpencil, di luar program mereka sendiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengidentifikasi 300 Sekolah Satu Atap di mana program-program pravokasional akan diimplementasikan pada tahun 2013. Pengalaman dan model-model yang digunakan di Sukabumi telah diinformasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diharapkan dapat menyebarluaskan kegiatan pelatihan pravokasional.

Lokasi-Lokasi Sekolah Satu Atap (SATAP) yang Terlibat dalam Program Aksi di Sukabumi



| NO | NAMA SEKOLAH |
|----|--------------------------------------|
| 1 | SMPN SATAP CIGELANG - CIRACAP |
| 2 | SMPN 7 SURADE SATAP (PASIRMALANG) |
| 3 | SMPN 8 SURADE SATAP (CIJAMBE) |
| 4 | SMPN SATAP CIBINONG - WALURAN |
| 5 | SMPN SATAP CIBINONG - KALIBUNDER |
| 6 | SMPN SATAP CIKADU - TEGALBULEUD |
| 7 | SMPN SATAP KARANGANYAR - TEGALBULEUD |
| 8 | SMPN 5 JAMPANGTENGAH SATAP |
| 9 | SMPN 2 CIKAKAK SATAP (CIHAUR) |
| 10 | SMPN 3 WARUNGKIARA SATAP |
| 11 | SMPN SATAP SAMPALAN - CIKEMBAR |
| 12 | SMPN 4 GEGERBITUNG SATAP |

| | |
|---|-----------------------------|
| A | SDN CIPTAGELAR - CISOLOK |
| B | SDN CICEMET - CISOLOK |
| C | SDN 2 CIJUREY - GEGERBITUNG |
| D | SDN CIBEAS - SIMPENAN |

Makassar, Sulawesi Selatan, Lembaga Perlindungan Anak

Tempat Pembuangan Sampah Akhir Antang di Kota Makassar berlokasi di Desa Tamangapa, Kecamatan Manggala, kurang lebih berjarak 15 km dari pusat kota Makassar dengan total penduduk kurang lebih 1,3 juta orang. Ada hampir 1000 orang yang bekerja di tempat pembuangan tersebut di mana 30% nya adalah anak-anak. Dua pertiga dari anak-anak di tempat pembuangan sampah akhir tersebut telah menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar. Selain mengalami ketertinggalan dalam bidang pendidikan, anak-anak di tempat pembuangan sampah akhir tersebut juga dapat menghadapi serangkaian resiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Banyak anak-anak yang bekerja dari jam 6 sore hingga tengah malam.

Strategi Program

Strategi program adalah untuk menyajikan model yang terintegrasi dimana melibatkan serangkaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dan intervensi dalam bidang pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat membantu menanggulangi masalah yang terlokalisir dari bentuk-bentuk pekerja anak yang dapat menjadi resiko yang serius terhadap keselamatan dan kesehatan anak-anak.

Program aksi bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan pada total 100 anak di Antang selain juga program untuk meningkatkan kesadaran di tingkat lokal terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak yang bekerja sebagai pemulung. Lembaga Perlindungan Anak, organisasi non-pemerintah telah berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Program *bridging course* yang membekali dengan kecakapan dasar berhitung dan baca tulis, Pendidikan Kesetaraan (Paket B) serta berbagai perangkat interaktif yang bersifat atraktif disediakan untuk anak-anak yang putus sekolah.

Hasil yang Telah Dicapai Sejauh Ini

Program aksi telah menyediakan layanan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan pada 67 anak untuk membantu mencegah mereka putus sekolah dan 40 anak yang berusia antara 15-17 tahun telah dibekali dengan pelatihan vokasional. 12 anak yang telah putus sekolah dibekali dengan program *bridging course* dan telah berhasil merujuk mereka kembali ke sekolah. Program ini juga telah melatih para pekerja sosial, pekerja

lapangan, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulangi berbagai permasalahan pekerja anak di tempat pembuangan sampah akhir.

Keberlangsungan

Program ini telah membangun kerjasama yang kuat dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk mendukung pengembangan aktivitas lebih lanjut di tahun 2013.

Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

Permasalahan

Meskipun angka partisipasi pendidikan di Jakarta termasuk yang tertinggi di negara ini, masih terdapat beberapa anak dari keluarga sangat miskin yang putus sekolah dan bekerja di jalan. Program aksi ini dikembangkan untuk mendukung berbagai kebutuhan Kementerian Sosial dalam upaya membantu anak-anak yang bekerja di jalan. Program Kementerian Sosial berkaitan erat dengan *Program Keluarga Harapan*.

Strategi

Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat kapasitas para pekerja sosial dan para pendamping dalam membantu anak-anak yang bekerja di jalan dengan memberikan mereka akses kepada berbagai layanan pendidikan. Program ini juga berupaya untuk memperkuat kapasitas pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk menyediakan berbagai layanan pendidikan bagi anak-anak jalanan yang berusia antara 14-17 tahun. Lembaga pelaksana bekerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengidentifikasi dan memilih PKBM yang menyediakan berbagai layanan bagi anak-anak disamping mengembangkan materi bagi pelatihan para pendamping.

Hasil yang Telah Dicapai Sejauh Ini

YKAI telah melatih 88 pekerja sosial (baik pekerja sosial yang berada di bawah KementErian Sosial maupun pekerja sosial masyarakat) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberi pembekalan pendidikan

kecakapan hidup. Total 100 anak jalanan telah berpartisipasi dalam pendidikan non-formal serta berbagai aktivitas pelatihan ketrampilan vokasional yang diselenggarakan melalui PKBM.

Keberlangsungan

Perangkat utama yang digunakan di bawah program aksi nasional adalah perangkat Kecakapan Hidup yang dikembangkan oleh ILO dan dikenal dengan "Rights, Responsibilities, and Representation (Hak, Tanggungjawab, dan Representasi – 3R)." Perangkat ini telah mendapat penerimaan yang sangat baik dari Direktorat Kesejahteraan Anak pada Kementerian Sosial. Perangkat tersebut telah diperkenalkan dan digunakan oleh para pekerja sosial di bawah Kementerian Sosial (Sakti Peksos). Dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta diupayakan untuk mengarusutamakan perangkat ini ke dalam pelatihan nasional bagi para pekerja sosial di bawah Kementerian Sosial.

Kesimpulan dari Diskusi dalam Rapat dengan Para Mitra

Dalam rapat dengan para mitra ILO ini, para peserta menekankan pada beberapa pokok penting sebagai berikut:

- Kebutuhan akan perhatian mendesak pada anak-anak yang tidak tersentuh oleh berbagai intervensi kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses ke pendidikan. Data SUSENAS yang diterbitkan baru-baru ini menyiratkan masih terdapat kelompok anak dalam jumlah besar yang putus sekolah setelah SD. Banyak dari anak-anak ini berkecimpung sebagai pekerja anak.
- Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran pada komunitas-komunitas lokal, yang didukung oleh intervensi-intervensi program lokal, untuk memastikan seluruh anak menyelesaikan tingkat pendidikan setaraf SMP.
- Berbagai strategi untuk intervensi pada tingkat lokal ini perlu melibatkan semua Kementerian dan Instansi yang terkait serta para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Selain dari tiga program yang disajikan dalam rapat, proyek ILO di Indonesia mendukung sejumlah intervensi lain, termasuk penelitian dan peningkatan kesadaran. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan semua aktivitas proyek silakan hubungi dede@ilo.org.

**Daftar Para Peserta yang Hadir
dalam Rapat untuk Berbagi Pengetahuan Mengenai Proyek
Diselenggarakan di Kantor ILO Jakarta, 23 Januari 2013**

| No. | Nama | Institusi |
|-----|---------------|--|
| 1. | M. Ghufan | Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan |
| 2. | Widodo | Dinas Pendidikan Sukabumi |
| 3. | Winarti | Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia |
| 4. | Ardian yus | Aliansi Jurnalistik Independen |
| 5. | Yohana Dona | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 6. | Sahala T | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 7. | Inke Maris | Mitra Imadei |
| 8. | Fatimah | POLRI |
| 9. | Tio L.R. | Dinas Pendidikan DKI Jakarta |
| 10. | Sri Winarni | APINDO |
| 11. | Yuyun | Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia |
| 12. | Susetyo W. | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan |
| 13. | Nila Meutia | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan |
| 14. | Maria Yohana | Mitra Imadei |
| 15. | M. Dirwan | Dinas Pendidikan Makassar |
| 16. | Bambang W. | Kementerian Sosial |
| 17. | Rahmat K. | Kementerian Sosial |
| 18. | Ahmad Marzuki | Jarak |
| 19. | Puji A. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |

Rapat bersama para Mitra

Kantor ILO Jakarta,
23 Januari 2013

